



RANCANGAN AWAL
RENCANA
KERJA

RENJA

TAHUN 2026

DINAS KESEHATAN ACEH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Aceh tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh untuk tahun anggaran 2026.

Dengan adanya Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh ini, diharapkan Satuan Kerja Perangkat Aceh dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBA dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Rancangan Renja Kesehatan Aceh ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya untuk perbaikan Ranwal Renja Dinas Kesehatan Aceh di tahun yang akan datang, namun demikian semoga Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh ini dapat berguna bagi kita semua.

Banda Aceh, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan



dr. Munawar, Sp. OG (K)
NIP. 19720608 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN ACEH TAHUN 2023	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Aceh	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Aceh	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Aceh	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA 2025	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN ACEH ..	37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Aceh	40
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Aceh	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN ACEH	55
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program-program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1) Rancangan Renja SKPA merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 2) Rancangan Renja SKPA merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi SKPA Dinas Kesehatan Aceh, saat ini masih ada beberapa indikator utama yang belum mencapai target diantaranya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Balita Stunting yang masih tinggi serta belum fungsionalnya 5 RS Regional yang berada di 5 Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang juga masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan di Aceh antara lain:

1. Dinamika pembangunan Aceh yang turut berpengaruh pada politik anggaran dan transisi demografi dengan mobilitas penduduk yang tinggi.
2. Disparitas status kesehatan antar wilayah terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

3. Kecenderungan peningkatan pola penyakit menular dan kecenderungan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular serta masalah gizi yang berkaitan dengan perilaku.
4. Sistem manajemen kefarmasian terutama pemesanan dengan e-catalog, komunikasi dan keterjangkauan distributor penyediaan obat sesuai dengan Formularium Nasional (Fornas) serta penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan.
5. Sistem informasi kesehatan berbasis teknologi.
6. Profesionalisme tenaga kesehatan dan sertifikasi fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan.
7. Dinamika perubahan kebijakan pembangunan kesehatan.

Untuk mewujudkan pencapaian tersebut maka perlu disusun Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh. Rancangan Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi. Interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja Dinas Kesehatan. Dengan kata lain melalui Renja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Dinas Kesehatan Aceh sebagai salah satu lembaga teknis daerah dengan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun rencana dan melaksanakan

pengendalian program pembangunan daerah harus merumuskan Rencana Kerja yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai arah dan target Dinas Kesehatan Aceh dalam mengatasi kondisi kesehatan masyarakat saat ini, disusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2026. Rancangan Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program pembangunan kesehatan Aceh dengan indikator kinerjanya masing-masing, sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Aceh dalam penanganan kesehatan di Aceh pada Tahun 2026.

Sebagai penuntun arah pembangunan kesehatan Aceh satu tahun yang akan datang, Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh disusun secara sinergis dan saling melengkapi dengan rencana pembangunan kesehatan di Kabupaten/kota. Karena itu, Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh ini dipandang sebagai suatu *rolling plan*, yakni suatu rencana yang secara reguler dan sistimatis dapat dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dilingkungan internal maupun eksternal, seperti perubahan aturan yang terkait dengan sektor kesehatan, seperti kondisi keuangan Negara/daerah, transisi epidemiologi, iklim politik, dan kondisi eksternal lainnya yang mempengaruhi asumsi-asumsi dalam penyusunan Renja ini.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2026 disusun berlandaskan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Provinsi Aceh Nomor 30);
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
21. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA Tahun 2023-2026);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2026 ini adalah untuk:

1. Mewujudkan sinergitas dan integrasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Dinas Kesehatan Aceh.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Aceh dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu isu

penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Aceh dalam pembangunan daerah.

3. Menyelaraskan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Aceh terhadap usulan masyarakat.

Tujuan khusus dari Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh ini meliputi:

1. Sebagai Pedoman Teknis dan strategi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Aceh;
2. Menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Aceh sesuai Tupoksinya;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kesehatan Aceh ini mengikuti logika dan alur pikir siklus pemecahan masalah (*problem solving cycle*) dengan melakukan workshop dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan termasuk unsur eksekutif, legislatif, wakil/tokoh masyarakat, sektor kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas), organisasi profesi, akademisi, LSM dan unsur swasta.

Merujuk pada sistematika penulisan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta memperhatikan kemudahan pemahaman semua pihak, maka dokumen ini dibagi menjadi lima BAB yaitu:

BAB Pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas mengenai pengertian tentang Renja Dinas Kesehatan Aceh,

keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBA.

BAB Kedua berupa gambaran dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Aceh tahun yang lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Aceh. Pada bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, *review* terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan.

BAB Tiga memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPA berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPA.

BAB Keempat berisi rencana kerja dan pendanaan SKPA.

BAB Kelima berisi Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN ACEH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Aceh

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Secara umum pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Aceh tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja dan juga dilakukan perbandingan dengan realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maupun dengan standar yang lazim.

Secara umum juga dapat disampaikan bahwa dari tiga sasaran strategis Dinas Kesehatan Aceh yang telah ditargetkan sebahagian besar telah tercapai secara maksimal. Adapun terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang belum maksimal diwujudkan, Dinas Kesehatan Aceh telah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan telah mengambil langkah-langkah serta upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara

lengkap dan akurat. Bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik terhadap kebijakan itu sendiri maupun terhadap sistem dan proses pelaksanaannya.

Secara umum, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Aceh sampai dengan tahun 2024, dapat juga dilihat pada **Tabel TC-29** berikut ini.

TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S/D TAHUN 2025
PROVINSI ACEH

SKPA : DINAS KESEHATAN ACEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	95%	95%	95%		
1.02	01	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen		
1.02	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.02	01	101	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	400%
1.02	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%
1.02	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.02	01	102		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Adminitrasi Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
1.02	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	340 Orang	100%	340 Orang	340 Orang	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4 laporan	4 laporan	100%
1.05	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
1.02	1	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket			2 paket	
1.02	1	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	18 Orang	10 Orang	6 Orang	88%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02	01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	83%	100%	100%	100%	100%	
1.02	01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	
1.02	01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	10 Paket	0 Paket	0%	3 Paket	
1.02	01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	
1.02	01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	
1.02	01 106 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	
1.02	01 106 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu							
1.02	01 106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	11 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	5 Laporan	
1.02	01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	0	0	0	0%	100%	
1.01	01 107 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	-	-	-	-	6 Unit	
1.02	01 107 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	-	2 Paket	
1.02	01 108	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02	01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	
1.02	01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	
1.02	01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02	01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02	01 109 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	60 Unit	60 Unit	70 Unit	117%	60 Unit	
1.02	01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	6 Unit	7 Unit	117%	6 Unit	
1.02	01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	6 Unit	
1.02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi 2.Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1.100 2. 1.85	1. 93 2. 1.93	1. 100 2. 1.85	1. 99,1 2. 1.93	1. 99,1% 2. 104%	1.100 2. 1.85	
1.02	02 101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk 2.Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 3.Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Medik dan Kesmas (Pengujian) 4. Jumlah Alkes yang dilakukan	1.1,85 2. 100 3.7000 4. 70	1.1,93 2. 87,56 3. 6.973 4. 45	1.1,85 2. 100 3. 6000 4. 70	1.1,93 2. 85,38 3. 2807 4. 34	1. 104% 2. 85,38% 3. 47% 4. 49%	1.1,85 2. 100 3.7000 4. 70	
1.02	02 101 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit	4 Unit	5 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	
1.02	02 101 04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	11 Unit	10 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	
1.02	02 101 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			63 Unit	6 Unit	10%	53 Unit	
1.02	02 101 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	70 Unit	13 unit	70 Unit	4 Unit	6%	70 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02	02 101 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	819 Unit	663 Unit	720 Unit	177 Unit	25%	756 Unit	
1.02	02 101 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4100 Dokumen	1476 dokumen	4050 Dokumen	3.166 Dokumen	78%	4050 Dokumen	
	03 101 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	55 Paket	51 Paket	50 Paket	20 Paket	40%	50 Paket	
1.02	02 102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prevalensi balita gizi kurang	6,50%	4,50%	7,30%	8,30%	113,70%	6,70%	
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	10/1.000 LH	11 /1.000 LH	11,5 /1.000 LH	2 /1.000 LH	182,61%	10,5/1.000 LH	
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8/1.000 LH	13 /1.000 LH	9 /1.000 LH	7 /1.000 LH	122,22%	8,5/1.000 LH	
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	26,10%	95%	96%	101,05%	98,00%	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	81,03%	92%	77%	83,70%	94,00%	
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	90,85%	92%	100%	108,70%	100,00%	
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	47%	46,44%	40%	43,70%	109,25%	45,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	95%	39,40%	94,60%	36,70%	38,79%	95,00%		
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2 /100.000 LH	9,59 /100.000 LH	2 /100.000 LH	7,6 /100.000 LH	380,00%	2 /100.000 LH		
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani sesuai standar	80%	80%	71%	87,30%	122,96%	77,00%		
		Jumlah Kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1 %	12 Kab/Kota	11 Kab/Kota	12 Kab/Kota	11 Kab/Kota	91,67%	12 Kab/Kota		
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki ≥20% puskesmas rujukan rabies center	18 Kab/Kota	11 Kab/Kota	10 Kab/Kota	11 Kab/Kota	110,00%	15 Kab/Kota		
		Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)	65%	60%	50%	75%	150,00%	60,00%		
		Persentase Kab/Kota dengan IR DBD ≤10 / 100.000 penduduk	95%	80%	80%	13%	16,25%	90,00%		
		Penderita diare yang ditangani sesuai standar	100%	90%	85%	90,30%	106,24%	95,00%		
		Jumlah Kab/Kota dengan API < / 1000 penduduk	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	22 Kab/Kota	23 Kab/Kota	104,55%	23 Kab/Kota		
		Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	<0,05 %	<0,05 %	<0,05 %	0,01%	100,00%	<0,05%		
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%		
		Cakupan kunjungan bayi	90%	81,65%	60%	71,60%	119,33%	80,00%		
		Cakupan puskesmas	1,25%	0,80%	1,25%	0,80%	64,00%	1,25%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K6	92%	54,95%	89%	54,39%	61,11%	91,00%		
		Cakupan pelayanan nifas	90%	65,71%	87%	62,22%	71,52%	89,00%		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	40%	4,56%	32%	5,18%	16,19%	36,00%		
		Cakupan pelayanan anak balita	56%	73,29%	50%	78,40%	156,80%	54,00%		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana Dan / Atau Berpotensi Bencana	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%		
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	23 Kab/Kota	18 Kab/Kota	21 Kab/Kota	23 Kab/Kota	109,52%	23 Kab/Kota		
		Jumlah Kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) ≥ 80% Populasi usia ≥ 15 tahun	14 Kab/Kota	23 Kab/Kota	6 Kab/Kota	23 Kab/Kota	383,33%	12 Kab/Kota		
		Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	16 Kab/Kota	23 Kab/Kota	143,75%	21 Kab/Kota		
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan layanan	100%	83,52%	90%	121%	134,44%	100,00%		
		Persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan	60%	45%	40%	47,55%	118,88%	55,00%		
		Persentase penderita Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan	60%	45%	40%	47,55%	118,88%	55,00%		


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Reallisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	275 Jumlah Fasyankes	211 Jumlah Fasyankes	215 Jumlah Fasyankes	229 Jumlah Fasyankes	106,51%	255 Jumlah Fasyankes					
		Persentase desa/ kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS)	70%	36,33%	40%	97,73%	244,33%	60,00%					
		Persentase jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan.	100%	43,18%	100%	56,20%	56,20%	100,00%					
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dasar	23 Kab/Kota	18 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100,00%	23 Kab/Kota					
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	23 Kab/Kota	18 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100,00%	23 Kab/Kota					
		Persentase cakupan penemuan kasus kusta baru tanpa cacat	95%	95%	95%	95%	100,00%	95,00%					
		Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80Persen.	85%	86,90%	75%	98,90%	131,87%	85,00%					
		Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella.	70%	17,70%	60%	22,80%	38,00%	65,00%					
		Persentase hasil Pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%					
		Jumlah Kab/Kota dengan lokus stunting yang melaksanakan POPM Kecacingan	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	14 Kab/Kota	23 Kab/Kota	164,29%	18 Kab/Kota					
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor	16 Kab/Kota	12 Kab/Kota	6 Kab/Kota	22 Kab/Kota	366,67%	14 Kab/Kota					
1.02	02	102	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	10 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	10 Dokumen		
1.02	02	102	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	4 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10={5+7+9}	11={10/4}
1.02	02 102 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	3 Dokumen	
1.02	02 102 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50%	10 Dokumen	
1.02	02 102 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	5 Dokumen	
1.02	02 102 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17 Dokumen	15 Dokumen	10 Dokumen	25 Dokumen	250%	17 Dokumen	
1.02	02 102 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	23 Dokumen	11 Dokumen	23 Dokumen	21 Dokumen	91%	23 Dokumen	
1.02	02 102 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	14 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	17 Dokumen	
1.02	02 102 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	1000%	1 Dokumen	
1.02	02 102 13	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	
1.02	02 102 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
1.02	02 102 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	1000%	1 Dokumen	
1.02	02 102 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	23 Dokumen	18 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	120%	23 Dokumen	
1.02	02 102 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	600%	1 Dokumen	
1.02	02 102 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23 Unit	27 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	23 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1.02	02	103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	133%	3 Dokumen		
1.02	02	103	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	
1.02	02	104		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase rumah sakit terakreditasi	100%	100%	100%	94%	94%	100%	
1.02	02	104	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	62 Unit	35 Unit	50 Unit	45 Unit	90%	62 Unit	
1.02	02	104	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	71 Unit	51 Unit	445 Unit	185 Unit	42%	71 Unit	
1.02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	100%	85%	63%	84,97%		100%	
1.02	03	101		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah Kab /Kota Yang Memiliki 4 Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Lainnya. 2. Persentase Puskesmas Tanpa Dokter.	1. 95% 2. 0%	1. 85% 2. 0%	1. 80% 2. 0%	1. 79% 2. 0%	1. 98,75% 2. 0%	1. 95% 2. 0%	
1.02	03	101	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2.781 Orang	2.367 Orang	2.907 Orang	2.799 Orang	96%	2.781 Orang	
1.02	03	102		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2600 orang/ 12 dokumen	2211 Orang	2200 Orang	4973 Orang	226%	2600 orang/ 12 dokumen	
1.02	03	102	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	2.600 Orang	3.905 Orang	2.400 Orang	4.973 Orang	207%	2.600 Orang	
1.03	04	103	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	89%	12 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1.02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas	75%	70%	70%	91,30%	130%	75%		
1.02	05	101	Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk forum gerakan masyarakat hidup sehat di Aceh	86%	70%	52%	26,08%	50%	86%		
1.02	05	101	01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	20 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen	92%	20 Dokumen		
1.02	05	102	Pelaksanaan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan sehat dalam Rangka Promotif Preventif	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PHBS di 5 tatanan	86%	75%	52%	100%	192%	86%		
1.02	05	102	01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	20 Dokumen	15 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	20 Dokumen		
1.02	05	103	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	86%	100%	63%	95,50%	152%	86%		
1.02	05	103	01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	20 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	20 Dokumen		

Banda Aceh, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan Aceh,


dr. Munawar Sp. OG (K)

Nip. 19720608 200012 1 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Aceh

2.2.1. Pencapaian Kinerja SPM Dinas Kesehatan Aceh

Merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan maka terdapat 2 (dua) indikator yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Aceh. Penjelasan terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan Aceh yang berkaitan dengan SPM bidang kesehatan dapat dilihat pada **Tabel T-C.30** berikut ini.

TABEL T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA DINAS KESEHATAN ACEH
PROVINSI ACEH

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	SPM Kesehatan Daerah Provinsi											
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	156.044	5.554.815	5.625.960	5.630.600	122.548	N/A	5.625.960	5.630.600	
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada konisi kejadian luar biasa	100%	100%	247.896	5.554.815	5.625.960	5.630.600	5.570	N/A	5.630.600	5.630.600	

Banda Aceh, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan Aceh,

dr. Munawar, Sp. OG (K)

Nip. 19720608 200012 1 001

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Aceh

Adapun isu strategis yang ditangani Dinas Kesehatan Aceh pada tahun 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan unit kerja sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat. Di samping itu, dengan isu strategis ini juga akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah.

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan.
- Penempatan pejabat eselon II, III dan IV serta staf Dinas Kesehatan sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian.
- Optimalisasi koordinasi di internal dinas kesehatan.
- Diperlukan peremajaan peralatan pendukung kinerja.
- Belum optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait
- Evaluasi kebijakan perencanaan.
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan akses kesehatan diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan terlatih dan peningkatan Jaminan Kesehatan Aceh. Selanjutnya penanganan stunting harus diupayakan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan untuk:

- Optimalisasi Tatakelola/administrasi dan manajemen kesehatan;
- Pengelolaan dan pendayagunaan SDM kesehatan;
- Pembiayaan dan penganggaran yang proporsional;
- Penyediaan kelengkapan sarana prasarana, obat dan alat kesehatan;
- Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas program;
- Penguatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat; dan
- Mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kesehatan.

2.3.1. Koordinasi dan Sinergitas Program Dengan Kabupaten/Kota

Model pembangunan kesehatan di era desentralisasi saat ini, memperhatikan kondisi natural dan kebutuhan lokal sekaligus mengakomodasi tujuan pembangunan kesehatan secara nasional.

Pendekatan *intersectoral convergence* sangat membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi level kerja sama baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota sehingga dapat dilakukan pemetaan yang komprehensif tentang peran dan keterlibatan masing-masing aktor dan organisasi dalam pembangunan kesehatan. Selain itu pendekatan tersebut juga mengakomodir persoalan kompleksitas urusan administrasi dan operasional teknis lewat pertimbangan kongkurensi antara tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian terjadi kejelasan antara siapa saja (*who*) yang terlibat dan bagaimana (*how*) peran mereka dalam mendukung peningkatan status kesehatan.

Koordinasi dan sinergitas program kesehatan baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat yang selama ini terjalin menjadi acuan keberhasilan berbagai program kesehatan dan masing-masing level mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing pula, dari level pembuat kebijakan, koordinasi sampai eksekusi kebijakan dilapangan. Hal ini dapat tercermin dari harmonisnya pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai berbagai indikator keberhasilan dalam bidang kesehatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa hal yang menyebabkan kinerja program kesehatan belum dapat dilaksanakan optimal antara lain sebagai berikut:

Pertama : Ketimpangan/disparitas derajat kesehatan masyarakat antar wilayah.

Berdasarkan data kuantitatif yang memberi informasi kinerja sebagaimana tersebut diatas, secara umum status kesehatan dan gizi masyarakat Aceh telah mengalami peningkatan walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan status kesehatan di provinsi lain terutama di pulau Jawa dan Bali. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut antara lain geografis wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, sosial budaya setempat, pendidikan dan perilaku masyarakat. Selain itu angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

relatif masih tinggi, cakupan imunisasi dasar masih sangat rendah, tingginya prevalensi masalah gizi pada balita seperti stunting serta status gizi kurang dan gizi buruk, yang sebagian besar permasalahan ini berada di pedesaan.

Angka kesakitan untuk penyakit menular juga masih tinggi terutama pada kelompok miskin yang rentan terhadap berbagai penyakit infeksi seperti ISPA, diare, demam berdarah (DBD), tuberkulosis paru dan malaria.

Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan secara umum sudah meningkat walaupun masih ada beberapa wilayah terpencil, akses pelayanan kesehatan masih terkendala faktor geografis dan transportasi.

Kedua : Masalah double burden of diseases.

Permasalahan penyakit menular belum tuntas diselesaikan, namun terjadi pula peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang begitu cepat akibat pergeseran perilaku hidup yang konsumtif, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, Diabetes Mellitus (DM) dan kanker, sehingga diperlukan upaya keras untuk mengatasi beban ganda terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, munculnya penyakit masyarakat akibat perilaku menyimpang seperti, HIV dan AIDS yang cenderung meningkat, yang pada umumnya mendominasi usia produktif. Meningkatnya jumlah penduduk, pergeseran pola penyakit dan pola hidup masyarakat yang sangat variatif serta perubahan struktur geografis penduduk berimplikasi terhadap tuntutan terhadap jumlah, jenis dan kualitas pelayanan yang berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

Ketiga : Rendahnya upaya pencegahan dan promosi kesehatan

Mencermati permasalahan kesehatan masyarakat secara umum, sebenarnya dapat dilakukan dengan pendekatan promosi dan preventif yang terjangkau masyarakat. Namun dalam upaya ini masih belum

optimal dan belum secara massal diadopsi oleh masyarakat karena merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam konteks sosial budaya memerlukan effort yang besar dan terus menerus sehingga masyarakat yakin bahwa upaya pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibanding pengobatan penyakit. Oleh karena itu upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu dan segera digaungkan kembali secara massal dan berkesinambungan.

Rendahnya upaya peningkatan promotif dan pencegahan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain rendahnya cakupan imunisasi lengkap, cakupan pemberian ASI Eksklusif, tinggi prevalensi kasus TB, malaria dan insiden DBD.

Keempat : Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan

Intervensi terhadap kondisi kesehatan lingkungan harus dilakukan secara lintas sektor dan melibatkan masyarakat. Rendahnya kondisi lingkungan, berdampak buruk terhadap status kesehatan, baik individu, keluarga maupun kelompok karena ketersediaan dan akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar mutlak diperlukan dalam siklus kehidupan manusia. Indikator kesehatan lingkungan dapat dilihat dari persentase kelompok masyarakat yang akses terhadap air bersih yang masih rendah dan sanitasi dasar yang belum standar sesuai kaedah-kaedah kesehatan.

Kelima : Masih rendahnya keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan

Seluruh kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta dan puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, namun kualitas pelayanan masih rendah, sehingga tidak jarang terlihat sebagian masyarakat tidak puas dan bagi mereka yang mampu akan memilih pelayanan kesehatan diluar Aceh dan bahkan keluar negeri. Ketidakpuasan terhadap pelayanan terutama dikarenakan lambatnya pelayanan, ketidakjelasan informasi pelayanan, proses administrasi dan lamanya waktu tunggu.

Sebenarnya di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah berlangsung selama 7 tahun ini, adalah era penguatan sistem pelayanan yang berorientasi pada kualitas/mutu pelayanan, walaupun pada awalnya terasa sulit.

Keenam : Terbatasnya tenaga kesehatan strategis dan distribusi yang tidak merata.

Ketersediaan tenaga strategis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, farmasi, gizi dan laboratorium) masih belum terpenuhi dan merata, kecuali untuk jenis tenaga bidan dan perawat yang memang sudah tercukupi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2026 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan Aceh dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan Aceh.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Aceh berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Aceh berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

3. Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini

mempertuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan bahwa pilihan program tata kelola, dan pelayanan publik;

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan unit kerja sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat. Di samping itu, dengan isu strategis ini juga akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah.

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan.
- Penempatan pejabat eselon II, III dan IV serta staf Dinas Kesehatan sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian.
- Optimalisasi koordinasi di internal dinas kesehatan.
- Diperlukan peremajaan peralatan pendukung kinerja.
- Belum optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait
- Evaluasi kebijakan perencanaan.
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan akses kesehatan diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan terlatih dan peningkatan Jaminan Kesehatan Aceh. Selanjutnya penanganan stunting harus diupayakan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan untuk:

- Optimalisasi Tatakelola/administrasi dan manajemen kesehatan;
- Pengelolaan dan pendayagunaan SDM kesehatan;
- Pembiayaan dan penganggaran yang proporsional;
- Penyediaan kelengkapan sarana prasarana, obat dan alat kesehatan;
- Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas program;
- Penguatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat; dan
- Mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kesehatan.

2.3.1. Koordinasi dan Sinergitas Program Dengan Kabupaten/Kota

Model pembangunan kesehatan di era desentralisasi saat ini, memperhatikan kondisi natural dan kebutuhan lokal sekaligus mengakomodasi tujuan pembangunan kesehatan secara nasional. Pendekatan intersectoral convergence sangat membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi level kerja sama baik di tingkat

pusat, provinsi, kabupaten kota sehingga dapat dilakukan pemetaan yang komprehensif tentang peran dan keterlibatan masing-masing aktor dan organisasi dalam pembangunan kesehatan. Selain itu pendekatan tersebut juga mengakomodir persoalan kompleksitas urusan administrasi dan operasional teknis lewat pertimbangan kongkurensi antara tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian terjadi kejelasan antara siapa saja (who) yang terlibat dan bagaimana (how) peran mereka dalam mendukung peningkatan status kesehatan.

Koordinasi dan sinergitas program kesehatan baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat yang selama ini terjalin menjadi acuan keberhasilan berbagai program kesehatan dan masing-masing level mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing pula, dari level pembuat kebijakan, koordinasi sampai eksekusi kebijakan dilapangan. Hal ini dapat tercermin dari harmonisnya pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai berbagai indikator keberhasilan dalam bidang kesehatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa hal yang menyebabkan kinerja program kesehatan belum dapat dilaksanakan optimal antara lain sebagai berikut:

Pertama : Ketimpangan/disparitas derajat kesehatan masyarakat antar wilayah.

Berdasarkan data kuantitatif yang memberi informasi kinerja sebagaimana tersebut diatas, secara umum status kesehatan dan gizi masyarakat Aceh telah mengalami peningkatan walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan status kesehatan di provinsi lain terutama di pulau Jawa dan Bali. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut antara lain geografis wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, sosial budaya setempat, pendidikan dan perilaku masyarakat. Selain itu angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan relatif masih tinggi, cakupan imunisasi dasar masih sangat rendah, tingginya prevalensi masalah gizi pada balita seperti stunting serta

status gizi kurang dan gizi buruk, yang sebagian besar permasalahan ini berada di pedesaan.

Angka kesakitan untuk penyakit menular juga masih tinggi terutama pada kelompok miskin yang rentan terhadap berbagai penyakit infeksi seperti ISPA, diare, demam berdarah (DBD), tuberkulosis paru dan malaria.

Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan secara umum sudah meningkat walaupun masih ada beberapa wilayah terpencil, akses pelayanan kesehatan masih terkendala faktor geografis dan transportasi.

Kedua : Masalah double burden of diseases.

Permasalahan penyakit menular belum tuntas diselesaikan, namun terjadi pula peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang begitu cepat akibat pergeseran perilaku hidup yang konsumtif, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, Diabetes Mellitus (DM) dan kanker, sehingga diperlukan upaya keras untuk mengatasi beban ganda terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, munculnya penyakit masyarakat akibat perilaku menyimpang seperti, HIV dan AIDS yang cenderung meningkat, yang pada umumnya mendominasi usia produktif. Meningkatnya jumlah penduduk, pergeseran pola penyakit dan pola hidup masyarakat yang sangat variatif serta perubahan struktur geografis penduduk berimplikasi terhadap tuntutan terhadap jumlah, jenis dan kualitas pelayanan yang berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

Ketiga : Rendahnya upaya pencegahan dan promosi kesehatan

Mencermati permasalahan kesehatan masyarakat secara umum, sebenarnya dapat dilakukan dengan pendekatan promosi dan preventif yang terjangkau masyarakat. Namun dalam upaya ini masih belum optimal dan belum secara massal diadopsi oleh masyarakat karena merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam konteks sosial

budaya memerlukan effort yang besar dan terus menerus sehingga masyarakat yakin bahwa upaya pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibanding pengobatan penyakit. Oleh karena itu upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu dan segera digaungkan kembali secara massal dan berkesinambungan.

Rendahnya upaya peningkatan promotif dan pencegahan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain rendahnya cakupan imunisasi lengkap, cakupan pemberian ASI Eksklusif, tinggi prevalensi kasus TB, malaria dan insiden DBD.

Keempat : Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan

Intervensi terhadap kondisi kesehatan lingkungan harus dilakukan secara lintas sektor dan melibatkan masyarakat. Rendahnya kondisi lingkungan, berdampak buruk terhadap status kesehatan, baik individu, keluarga maupun kelompok karena ketersediaan dan akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar mutlak diperlukan dalam siklus kehidupan manusia. Indikator kesehatan lingkungan dapat dilihat dari persentase kelompok masyarakat yang akses terhadap air bersih yang masih rendah dan sanitasi dasar yang belum standar sesuai kaedah-kaedah kesehatan.

Kelima : Masih rendahnya keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan

Seluruh kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta dan puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, namun kualitas pelayanan masih rendah, sehingga tidak jarang terlihat sebagian masyarakat tidak puas dan bagi mereka yang mampu akan memilih pelayanan kesehatan diluar Aceh dan bahkan keluar negeri. Ketidak puasan terhadap pelayanan terutama dikarenakan lambatnya pelayanan, ketidakjelasan informasi pelayanan, proses administrasi dan lamanya waktu tunggu. Sebenarnya di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah berlangsung selama 7 tahun ini, adalah era penguatan sistem

pelayanan yang berorientasi pada kualitas/mutu pelayanan, walaupun pada awalnya terasa sulit.

Keenam : Terbatasnya tenaga kesehatan strategis dan distribusi yang tidak merata.

Ketersediaan tenaga strategis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, farmasi, gizi dan laboratorium) masih belum terpenuhi dan merata, kecuali untuk jenis tenaga bidan dan perawat yang memang sudah tercukupi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2026 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan Aceh dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan Aceh.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Aceh berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Aceh berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas

layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program. Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Review terhadap rancangan awal RKPA tahun 2026 Dinas Kesehatan Aceh dapat diteliti pada **Tabel T-C 31** berikut ini.

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2026
PROVINSI ACEH

SKPA : DINAS KESEHATAN ACEH

Nomor	Rancangan Awal RKPA										
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000,-)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000,-)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS KESEHATAN ACEH				744.380.806					744.380.806	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	100%	73.276.867				100%	73.276.867	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	10 Dokumen	597.803	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	10 Dokumen	597.803	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	330.000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	330.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	217.803	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	217.803	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	57.308.889	Administrasi Keuangan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	57.308.889	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang	57.233.889	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang	57.233.889	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	508.939	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	508.939	
1	Pegadaian Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	408.939	Pegadaian Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	408.939	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	100.000	

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2026
PROVINSI ACEH

SKPA : DINAS KESEHATAN ACEH

Nomor	Rancangan Awal RKPA						Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000,)	Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000,-)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.757.778	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.757.778	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	107.778	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	107.778	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	250.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	100.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	100.000	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	150.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	150.000	
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	150.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	150.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.350.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.350.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	7.003.458	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	7.003.458	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	15.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	15.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.500.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.488.458	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.488.458	

Nomor	Rancangan Awal RKPA						Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000,-)	Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000,-)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	3.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	3.100.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	1.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	1.700.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	700.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	700.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Provinsi	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Provinsi	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2.000.000	
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2.000.000	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi 2.Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1.100 2. 1.85	669.598.939			1.Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi 2.Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1.100 2. 1.85	669.598.939	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1.Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk 2.Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 3.Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Medik dan Kesmas (Pengujian) 4. Jumlah Alkes yang dilakukan Pengujian Alat (Kalibrasi)	1.1,85 2. 100 3.7000 4. 70	110.840.811	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1.Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk 2.Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 3.Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Medik dan Kesmas (Pengujian) 4. Jumlah Alkes yang dilakukan Pengujian Alat (Kalibrasi)	1.1,85 2. 100 3.5500 4. 70	110.840.811	
1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	A. Barat, A. Selatan, A. Tengah, Bireuen, Langsa	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit	99.940.000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	A. Barat, A. Selatan, A. Tengah, Bireuen, Langsa	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5 Unit	99.940.000	

Nomor	Rancangan Awal RKPA						Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000,)	Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000,-)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	50.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	50.000	
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	63 Unit	1.280.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	63 Unit	1.280.000	
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Aceh	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	70 Unit	100.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Aceh	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	70 Unit	100.000	
5	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Aceh	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	811 Unit	120.000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Aceh	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	811 Unit	120.000	
6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4100 Dokumen	500.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4100 Dokumen	500.000	
8	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aceh	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	55 Paket	8.850.811	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aceh	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	55 Paket	8.850.811	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Aceh	Prevalensi balita gizi kurang	6,50	557.908.128		Aceh	Prevalensi balita gizi kurang	6,50	557.908.128	
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	10				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	10		
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8		
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95		
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100		


Nomor	Rancangan Awal RKPA						Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000,)	Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000,-)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	47				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	47		
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	95				Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	95		
			Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2		
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani sesuai standar	80				Cakupan balita pneumonia yang ditangani sesuai standar	80		
			Jumlah Kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1 %	12				Jumlah Kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1 %	12		
			Jumlah Kab/Kota yang memiliki ≥20% puskesmas rujukan rabies center	18				Jumlah Kab/Kota yang memiliki ≥20% puskesmas rujukan rabies center	18		
			Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)	65				Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)	65		
			persentase Kab/Kota dengan IR DBD ≤10 / 100.000 penduduk	95				persentase Kab/Kota dengan IR DBD ≤10 / 100.000 penduduk	95		
			Penderita diare yang ditangani sesuai standar	100				Penderita diare yang ditangani sesuai standar	100		
			Jumlah Kab/Kota dengan API < / 1000 penduduk	23				Jumlah Kab/Kota dengan API < / 1000 penduduk	23		
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0,05				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<0,05		
			Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko	100				Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko	100		
			Cakupan kunjungan bayi	90				Cakupan kunjungan bayi	90		
			Cakupan puskesmas	1,25				Cakupan puskesmas	1,25		
			Cakupan kunjungan Ibu hamil K6	92				Cakupan kunjungan Ibu hamil K6	92		
			Cakupan pelayanan nifas	90				Cakupan pelayanan nifas	90		
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	40				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	40		
			Cakupan pelayanan anak balita	56				Cakupan pelayanan anak balita	56		

Nomor	Rancangan Awal RKPA					(7)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000.)	Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000.-)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana Dan / Atau Berpotensi	100			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana Dan / Atau Berpotensi	100			
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100			
			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	23			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	23			
			Jumlah Kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) ≥ 80% Populasi usia ≥ 15	14			Jumlah Kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) ≥ 80% Populasi usia ≥ 15	14			
			Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas	23			Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas	23			
			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan layanan	100			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan layanan	100			
			persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan	60			persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan	60			
			persentase penderita Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan	60			persentase penderita Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan	60			
			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	275			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	275			
			Persentase desa/ kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS)	70			Persentase desa/ kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS)	70			
			Persentase jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan.	100			Persentase jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan.	100			
			Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dasar	23			Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dasar	23			
			Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	23			Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	23			
			Persentase cakupan penemuan kasus kusta baru tanpa cacat	95			Persentase cakupan penemuan kasus kusta baru tanpa cacat	95			
			Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%	85			Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%	85			
			Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella.	70			Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella.	70			
			Persentase hasil Pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	100			Persentase hasil Pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	100			
			Jumlah Kab/Kota dengan lokus stunting yang melaksanakan POPM Kecacingan	23			Jumlah Kab/Kota dengan lokus stunting yang melaksanakan POPM Kecacingan	23			
			Jumlah Kab/Kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor	16			Jumlah Kab/Kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor	16			

Nomor	Rancangan Awal RKPA										
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000,-)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000,)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	0 orang	300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	0 orang	300.000	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	300.000	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	10 Dokumen	800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	10 Dokumen	800.000	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	4 Dokumen	250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	4 Dokumen	250.000	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	3 Dokumen	150.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	3 Dokumen	150.000	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	2.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	2.800.000	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	150.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	150.000	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19 Dokumen	450.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19 Dokumen	450.000	
8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	23 Dokumen	200.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	23 Dokumen	200.000	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	1.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	1.100.000	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	180.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	180.000	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7 Dokumen	250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7 Dokumen	250.000	
12	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	549.378.128	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	549.378.128	

Nomor	Rancangan Awal RKPA										
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000,-)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000,)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	500.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	500.000	
14	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	24 Dokumen	400.000	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	24 Dokumen	400.000	
15	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000	
16	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Aceh	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasikan dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23 Unit	500.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Aceh	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasikan dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23 Unit	500.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	150.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	150.000	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen	150.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen	150.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase rumah sakit terakreditasi.	100%	700.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase rumah sakit terakreditasi.	100%	700.000	
1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Aceh	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	71 Unit	350.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	71 Unit	350.000	
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Aceh	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	71 Unit	350.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Aceh	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	71 Unit	350.000	

Nomor	Rancangan Awal RKPA					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000.)	Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000.-)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	100%	1.075.000		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	100%	1.075.000		
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		1. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah Kab /KotaYang Memiliki 4 Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Lainnya. 2. Persentase Puskesmas Tanpa Dokter.	95%	400.000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah Kab /KotaYang Memiliki 4 Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Lainnya. 2. Persentase Puskesmas Tanpa Dokter.	95%	400.000		
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Aceh	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2907 org	400.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2907 org	400.000		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2800 orang / 12 dokumen	675.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2800 orang / 12 dokumen	675.000		
1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Aceh	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2.800 Org	400.000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2.800 Org	400.000		
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Aceh	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14 Dok	275.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14 Dok	275.000		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas	75%	430.000		Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas	70%	430.000		
	Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah provinsi		Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk forum gerakan masyarakat hidup sehat di Aceh	100%	150.000	Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk forum gerakan masyarakat hidup sehat di Aceh	100%	150.000		
1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	23 Dokumen	150.000	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	23 Dokumen	150.000		
	Pelaksanaan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PHBS di 5 tatanan	100%	140.000		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PHBS di 5 tatanan	100%	140.000		
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23 Dokumen	140.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23 Dokumen	140.000		
	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	100%	140.000		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	100%	140.000		
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	23 Dokumen	140.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	23 Dokumen	140.000		
	Jumlah				744.380.806	Jumlah			744.380.806		

Banda Aceh, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan Aceh,

dr. Munawar, Sp. OG (K)
Nip. 19720608 200012 1 001

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan kesehatan di Aceh yaitu masih ada program/kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja SKPA sejalan dengan dinamika masalah kesehatan yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRA, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya. Namun saat ini belum ada usulan masyarakat yang menjadi tupoksi Dinas Kesehatan Aceh.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN ACEH

Dinas Kesehatan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Kesehatan Aceh memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan urusan perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- d. Pelaksanaan pengawasan pembinaan, pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan.

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka susunan oranganisasi Dinas Kesehatan Aceh, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

7. UPTD Badan Pelatihan Kesehatan;
8. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan & Pengujian Alat Kesehatan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 - b. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - a. Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian
 - b. Seksi Standarisasi Alat Kesehatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan:

- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Mutu.
- (7) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan & Pengujian Alat Kesehatan:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Laboratorium; dan
 - c. Seksi Pengujian Alat Kesehatan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga arah kebijakannya.

Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- f. Terjaminnya pembiayaan kesehatan;

- g. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; dan
- h. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2020-2024 diarahkan pada:

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
- 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Aceh

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Aceh tahun 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Aceh tahun 2023-2026, pada tahun ke-4 dengan 4 Program dan 17 Kegiatan serta 55 subkegiatan sebagaimana rincian berikut ini:

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 08 Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

- 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 05 Pengadaan Mebel;
- 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD;
 - 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
- 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;

- 04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - 13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 - 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/
Peralatan Laboratorium Kesehatan;
 - 17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan
Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta
Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana;
 - 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif;
 - 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut;
 - 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
 - 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular;
 - 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji;
 - 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK);
 - 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

- 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan;
- 21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota;
- 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
 - 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;
- 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit;
 - 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
- 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 - 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
 - 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
 - 1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;

01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;

1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi;

01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi;

01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Aceh tahun 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Aceh pada Tahun ke-4 dengan 4 Program dan 17 Kegiatan serta 55 subkegiatan sebagaimana tertera pada **Tabel T-C 33** lampiran berikut ini.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027**

SKPA : DINAS KESEHATAN ACEH										Jumlah Pagu Indikatif : 744.380.806.746		
Nomor	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								744.380.806.746			757.757.121.735	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah		95%	73.276.867.400			95%	72.345.404.748
1.02	01	101		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		10 Dokumen	597.803.299		7 Dokumen	558.759.365	
1.02	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	4 Dokumen	330.000.000	DAU		4 Dokumen	336.600.000
1.02	01	101	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	2 Laporan	50.000.000	DAU		2 Laporan	
1.02	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	1 Laporan	217.803.299	DAU		1 Laporan	222.159.365
1.02	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Keuangan		1 Laporan	57.308.889.106			4 Laporan	58.455.066.888
1.02	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	340 Orang	57.233.889.106	DAU		340 Orang	58.378.566.888
01:02	1	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi	4 laporan	75.000.000	DAU		4 laporan	76.500.000
1.02	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai		100%	508.939.000			100%	519.117.780
1.02	1	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi	1 Paket	408.939.000	DAU		2 Paket	417.117.780
1.02	1	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi	15 Orang	100.000.000	DAU		15 Orang	102.000.000

Nomor	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	2.757.777.795			100%	2.506.933.351
1.02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi	5 Paket	107.777.795	DAU		5 Paket	109.933.351
1.02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi	3 Paket	250.000.000	DAU		3 Paket	255.000.000
1.02	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi	5 Paket	500.000.000	DAU		5 Paket	510.000.000
1.02	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	Provinsi	5 Paket	100.000.000	DAU		5 Paket	102.000.000
1.02	01	106	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi	5 Dokumen	150.000.000	DAU		5 Dokumen	153.000.000
1.02	01	106	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	Provinsi	1 Laporan	150.000.000				
1.02	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	5 Laporan	1.350.000.000	DAU		5 Laporan	1.377.000.000
1.02	01	106	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	1 Dokumen	150.000.000				153.000.000
1.02	01	108		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana		100%	7.003.458.200			100%	7.143.527.364
1.02	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	2 Laporan	15.000.000	DAU		2 Laporan	15.300.000
1.02	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi	4 Laporan	2.500.000.000	DAU		4 Laporan	2.550.000.000
1.02	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi	6 Laporan	4.488.458.200	DAU		6 Laporan	4.578.227.364
1.02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	3.100.000.000			100%	3.162.000.000
1.02	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi	60 Unit	1.700.000.000	DAU		60 Unit	1.734.000.000
1.02	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi	6 Unit	700.000.000	DAU		6 Unit	714.000.000
1.02	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi	6 Unit	700.000.000	DAU		6 Unit	714.000.000

Nomor	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02	01	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2 Unit Kerja	2.000.000.000				
1.02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2 Unit Kerja	2.000.000.000				
1.02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi 2.Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		1.100 2. 1.85	669.598.939.346			1.100 2. 1.85	678.541.041.563
1.02	02	101		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk 2.Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 3.Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Medik dan Kesmas (Pengujian) 4. Jumlah Alkes yang dilakukan Pengujian Alat (Kalibrasi)		1.1,85 2. 100 3.7000 4. 70	110.840.811.000			1.1,85 2. 100 3.7000 4. 70	334.610.165.443
1.02	02	101	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	A. Barat, A. Selatan, A. Tengah, Bireuen, Langsa	5 Unit	99.940.000.000	DAU		5 Unit	314.126.575.279
1.02	02	101	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Banda Aceh	10 Unit	50.000.000	DAU		5 Unit	51.000.000
1.02	02	101	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Aceh	63 Unit	1.280.000.000	OA		63 Unit	10.670.362.944
1.02	02	101	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Aceh	70 Unit	100.000.000	OA		70 Unit	102.000.000
1.02	02	101	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Aceh	811 Unit	120.000.000	OA		819 Unit	122.400.000
1.02	02	101	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aceh	4100 Dokumen	500.000.000	OA		4100 Dokumen	510.000.000
1.02	02	101	27	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Aceh	55 Paket	8.850.811.000	OA		55 Paket	9.027.827.220

Nomor	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02	02	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prevalensi balita gizi kurang		6,50	557.908.128.346			6,50	341.233.604.285
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		10				10	
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		8				8	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		100				100	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		95				95	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100				100	
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		47				47,00	
				Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		95				95	
				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		2				2	
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani sesuai standar		80				80	
				Jumlah Kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1 %		12				12	
				Jumlah Kab/Kota yang memiliki ≥20% puskesmas rujukan rabies center		18				18	
				Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)		65				65	
				persentase Kab/Kota dengan IR DBD ≤10 / 100.000 penduduk		95				95	
				Penderita diare yang ditangani sesuai standar		100				100	
				Jumlah Kab/Kota dengan API < / 1000 penduduk		23				23	
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		<0,05				<0,05	
				Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko		100				100	
				Cakupan kunjungan bayi		90				90	

Nomor	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Cakupan puskesmas		1,25				1,25	
			Cakupan kunjungan Ibu hamil K6		92				92	
			Cakupan pelayanan nifas		90				90	
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		40				40	
			Cakupan pelayanan anak balita		56				56	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana Dan / Atau Berpotensi Bencana		100				100	
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi		100				100	
			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		23				23	
			Jumlah Kab/kota yang melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) ≥ 80% Populasi usia ≥ 15 tahun		14				14	
			Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas		23				23	
			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan layanan		100				100	
			persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan		60				60	
			persentase penderita Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan		60				60	
			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar		275				275	
			Persentase desa/ kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS)		70				70	
			Persentase jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan.		100				100	
			Persentase jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan.		23				23	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga		23				23	

Nomor	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Persentase cakupan penemuan kasus kusta baru tanpa cacat Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%. Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella. Persentase hasil Pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional) Jumlah Kab/Kota dengan lokus stunting yang melaksanakan POPM Kecacingan Jumlah Kab/Kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor		95				95	
							85				85	
							70				70	
							100				100	
							23				23	
							16				16	
1.02	02	102	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Provinsi	0 orang	300.000.000	OA			306.000.000
1.02	02	102	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi	0 orang	300.000.000	OA			306.000.000
1.02	02	102	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi	10 Dokumen	800.000.000	OA		10 Dokumen	6.424.364.441
1.02	02	102	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi	4 Dokumen	250.000.000	OA		4 Dokumen	255.000.000
1.02	02	102	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi	3 Dokumen	150.000.000	OA		3 Dokumen	153.000.000
1.02	02	102	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi	10 Dokumen	2.800.000.000	OA		10 Dokumen	14.893.881.044
1.02	02	102	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab/Kota	6 Dokumen	150.000.000	OA		6 Dokumen	153.000.000
1.02	02	102	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab/Kota	19 Dokumen	450.000.000	OA		19 Dokumen	459.000.000
1.02	02	102	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab/Kota	23 Dokumen	200.000.000	OA		23 Dokumen	204.000.000
1.02	02	102	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab/Kota	18 Dokumen	1.100.000.000	OA		18 Dokumen	10.015.095.615
1.02	02	102	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab/Kota	1 Dokumen	180.000.000	OA		1 Dokumen	183.600.000

Nomor	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02	02	102	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab/Kota	7 Dokumen	250.000.000	OA		7 Dokumen	255.000.000
1.02	02	102	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Aceh	1 Dokumen	549.378.128.346	OA		1 Dokumen	299.378.128.346
1.02	02	102	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aceh	1 Dokumen	500.000.000	OA		1 Dokumen	510.000.000
1.02	02	102	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Aceh	24 Dokumen	400.000.000	OA		24 Dokumen	4.248.104.891
1.02	02	102	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Aceh	1 Dokumen	200.000.000	OA		1 Dokumen	204.000.000
1.02	02	102	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Aceh	23 Unit	500.000.000	OA		23 Unit	3.285.429.948
1.02	02	103		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		3 Dokumen	150.000.000			4 Dokumen	153.000.000
1.02	02	103	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Aceh	4 Dokumen	150.000.000	OA		4 Dokumen	153.000.000
1.02	02	104		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase rumah sakit terakreditasi.		100%	700.000.000			100%	2.544.271.835
1.02	02	104	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Aceh	71 Unit	350.000.000	OA		71 Unit	357.000.000
1.02	02	104	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Aceh	71 Unit	350.000.000	OA		71 Unit	2.187.271.835
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar		100%	1.075.000.000			100%	6.432.075.424
1.02	03	101		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah Kab /Kota Yang Memiliki 4 Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Lainnya. 2. Persentase Puskesmas Tanpa Dokter.		95%	400.000.000			95%	5.743.575.424
1.02	03	101	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Aceh	2907 org	400.000.000	OA		2907org	5.743.575.424
1.02	03	102		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya		2800 orang / 12 dokumen	675.000.000			2800 orang / 14 dokumen	688.500.000
1.02	03	102	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Aceh	2.800 Org	400.000.000	OA		2.800 Org	408.000.000
	04	103	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		14 Dok	275.000.000	OA		14 Dok	280.500.000

Nomor	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas		78%	430.000.000			78%	438.600.000
1.02	05	101		Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk forum gerakan masyarakat hidup sehat di Aceh		100%	150.000.000			100%	153.000.000
1.02	05	101	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Aceh	23 Dokumen	150.000.000	OA		23 Dokumen	153.000.000
1.02	05	102		Pelaksanaan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PHBS di 5 tatanan		100%	140.000.000			100%	142.800.000
1.02	05	102	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Aceh	23 Dokumen	140.000.000	OA		23 Dokumen	142.800.000
1.02	05	103		Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif		100%	140.000.000			100%	142.800.000
1.02	05	103	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Aceh	23 Dokumen	140.000.000	OA		23 Dokumen	142.800.000
				Jumlah				744.380.806.746				757.757.121.735

Banda Aceh, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan Aceh,



dr. Munawar, Sp. OG (K)
Nip. 19720608 200012 1 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN ACEH

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Aceh tahun 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Aceh pada Tahun ke-4 dengan 4 Program dan 17 Kegiatan serta 55 subkegiatan sebagaimana tertera pada **Tabel** lampiran berikut ini.

Nomor	Kode			Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif
	(1)			(2)	(3)
					744.380.806.746
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	73.276.867.400
1.02	01	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	597.803.299
1.02	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	330.000.000
1.02	01	101	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
1.02	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.803.299
1.02	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.308.889.106
1.02	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.233.889.106
1.02	1	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.000.000
1.02	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	508.939.000
1.02	1	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	408.939.000
1.02	1	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
1.02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.757.777.795
1.02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	107.777.795
1.02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000
1.02	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500.000.000
1.02	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
1.02	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000
1.02	01	106	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	150.000.000
1.02	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.350.000.000
1.02	01	106	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000
1.02	1	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.003.458.200
1.02	1	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
1.02	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000.000
1.02	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.488.458.200
1.02	1	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.100.000.000
1.02	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.700.000.000
1.02	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000
1.02	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000
1.02	01	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000
1.02	01	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000
1.02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	669.598.939.346
1.02	02	101		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	110.840.811.000
1.02	02	101	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	99.940.000.000
1.02	02	101	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000
1.02	02	101	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.280.000.000

Nomor	Kode			Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	
1.02	02	101	21	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	120.000.000
1.02	02	101	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000
1.02	02	101	27	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.850.811.000
1.02	02	102		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	557.908.128.346
1.02	02	102	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	300.000.000
1.02	02	102	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	300.000.000
1.02	02	102	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	800.000.000
1.02	02	102	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	250.000.000
1.02	02	102	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	150.000.000
1.02	02	102	06	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.800.000.000
1.02	02	102	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	150.000.000
1.02	02	102	08	Pengelolaan Layanan Kesehatan Lingkungan	450.000.000
1.02	02	102	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000
1.02	02	102	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.100.000.000
1.02	02	102	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	180.000.000
1.02	02	102	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	250.000.000
1.02	02	102	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	549.378.128.346
1.02	02	102	17	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	500.000.000
1.02	02	102	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	400.000.000
1.02	02	102	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	200.000.000
1.02	02	102	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	500.000.000
1.02	02	103		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	150.000.000
1.02	02	103	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	150.000.000
1.02	02	104		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	700.000.000
1.02	02	104	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	350.000.000
1.02	02	104	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	350.000.000
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.075.000.000
1.02	03	101		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	400.000.000
1.02	03	101	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	400.000.000
1.02	03	102		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	675.000.000
1.02	03	102	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	400.000.000
		04	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	275.000.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	430.000.000
1.02	05	101		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000
1.02	05	101	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000
1.02	05	102		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	140.000.000
1.02	05	102	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	140.000.000
1.02	05	102		Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	140.000.000
1.02	05	102	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	140.000.000

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja kolektif serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh yang penting untuk dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Aceh, guna mendukung tercapainya target pembangunan tahun 2026. Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Aceh telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan Awal Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Aceh sebagai salah satu SKPA di lingkup Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan isi Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Aceh ini.

Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Kesehatan secara luas, dan Rancangan Awal Renja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Aceh. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja ini.

Banda Aceh, Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan


dr. Munawar, Sp. OG (K)

NIP. 19720608 200012 1 00